

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Tahun 1956 Nomor 12 Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.697.104.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 120.722.447.970,00 (Seratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.817.827.326.491,00 (satu triliun delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp.1.709.234.477.510,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.85.428.989.065,00 (delapan puluh lima miliar

empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- b. belanja Daerah sebesar Rp.1.812.062.326.491,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebsar Rp. 1.693.206.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.118.855.447.970,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp. 102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - penerimaan pembiayaan sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - a) semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp.35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - 3. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 168.770.858.219,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sbegai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.138.430.526.445,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.30.340.331.774,00 (tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- b. pendapatan transfer sebesarRp.1.528.055.215.291,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan miliar lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.1.474.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 53.221.657.291,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliiar empat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah);dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. pajak Daerah sebesar Rp. 28.244.849.306,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - 1. semula sebesar Rp. 27.455.638.550,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.789.210.756,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
 - b. retribusi Daerah sebesar Rp. 9.164.490.663,00 (sembilan miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp. 7.863.651.179,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.300.839.484,00 (satu miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.927.624.525,00 (sepuluh milar sembila ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. semula sebesar Rp.9.766.118.702,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus dua rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 20.124.011.057,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta sebelas ribu lima puluh tujuh rupaih).

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yangsah sebesar Rp. 101.471.388.491,00 (seratus satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. semula sebesar Rp.93.345.118.014,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu empat belas rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 8.126.270.477,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumberdari:
 - a. transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.426.255.227.737,00 (satu triliun empat dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.1.414.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 11.421.669.737,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. transfer antar daerah sebesar Rp. 101.799.987.554,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ; dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.41.799.987.554,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
 - (3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.10.541.404.000,00 (sepuluh milar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - b. dana darurat sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan

2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasional sebesar Rp.1.304.615.721.089 ,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1. semula sebesar Rp. 1.252.845.697.180,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.51.770.023.909,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- b. belanja modal sebesar Rp. 252.497.150.315,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. semula sebesar Rp.218.593.033.169,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tuga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 33.904.117.146,00 (tiga puluh tiga tiga miliar sembilan ratus empat juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
 - c. belanja tidak terduga sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - d. belanja transfer sebesar Rp. 248.816.501.791,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. semula sebesar Rp.216.768.148.172,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.32.048.353.619,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp. 798.444.572.097,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp. 810.457.273.357,00 (delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp. 12.012.701.260,00 (dua belas miliar dua

belas juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- b. belanja barang danjasa sebesar Rp. 432.962.645.243,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp. 402.970.155.372,00 (empat ratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 29.992.489.871,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- c. belanjabunga sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. belanja subsidi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- e. belanja hibah sebesar Rp. 72.946.503.749,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.39.273.268.451,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 33.673.235.298,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- f. belanja bantuan sosial sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah sebesar Rp. 2.528.508.993,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.1.468.665.451,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.059.843.542,00 (satu miliyar lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 44.930.008.151,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

- 1. semula sebesar Rp. 49.971.046.318,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah); dan
- 2. berkurang sebesar Rp. 5.041.038.167,00 (lima miliar empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 50.157.286.572,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.50.761.762.922,00 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp. 604.476.350,00 (enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.145.094.628.849,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.109.952.605.781,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.35.142.023.068,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 9.786.717.750,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.6.438.952.697,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.3.347.765.053,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- f. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 0,00 (nol rupia), dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut ,yaitu:
 - a. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp. 1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus

sembilan puluh enam rupiah.).

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja bagihasil sebesar Rp. 3.708.320.997,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.3.531.928.972,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 176.392.025,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 245.108.180.794,00 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.213.236.219.200,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 31.871.961.594,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiriatas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahunsebelumnya sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua

- ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
- 2. bertambah sebesar Rp. 35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebegai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah).
- e. penerimaan kembali pemberian pinjamanDdaerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiriatas:
 - a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - b. penyertaan modal Daerah sebesar Rp.5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.3.898.000.000,00 (tiga miliardelapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp.1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesarRp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - d. pemberian pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesarRp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurangRp.0,00 (nol rupiah).

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Ketentuan mengenai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luarbiasa:
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifatwajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk

Pemenuhan SPM;

- g. lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. lampiran IX memuat Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan dan PerJabatan:
- j. lampiran X memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. lampiran XI memuat Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal / 25 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DASRAH

KABUPATEN PESISIN SELATAN.

LEMBA AN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (5/75/2023)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Berdasarkan Peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran angagran yang akan digunakan pada tahun 2023 dapat kita lihat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal Ranperda ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

IMPORTATION OF PRUBANIAN APPD YANG DIRLASFIRASI MENURUT URUSAN PEMBENTANA, BELANIA, DAN ILEMPISTAN			
ILENDRIAN I RINGGRASAN PRUBAHAN APID VANG DIRLASHIKASI MENURUT URUSAN PEMBRINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI LENDRIAN I RINGGRASAN PRUBAHAN APID MENURUT URUSAN PEMBRINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN III RINGGRASAN PERBUBAHAN APID MENURUTANAN PEMBRINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANIA DAN III 2 DANA SERIHATAN 3 DANA SERIHATAN 4 PUMERIMAK ARPUDAH 5 PUMERIMAK ARPUDAH 5 PUMERIMAK ARPUDAH 5 PUMERIMAK ARPUDAH 5 PUMERIMAK ARPUDAH 6 PUMERIMAK KATURANAN 6 PUMERIMAK KATURANAN PERBANANAN 6 PUMERIMAK KATURANAN PERBANAN PERBANANAN 6 PUMERIMAK KATURANAN PERBANAN PER	Lampiran I	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN	
INCIDAN FREIDMAND AFPO MENTINAT DUISAN PEMERINTANAN DARFAM, ORGANISAS, PENDAPATAN, SEANIA DAN III 1 1 1 1 1 1 1 1			
PRIMINATION OF THE PRIMINATION		RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN	
2			
3 SILO TAPAN			
4			
6 PUSESMANS PAGAR RUCK		PUSKESMAS AIRPURA	
PUSESANAS SURANTHI			
8 PUSKESHANS FAMBANG 9 PUSKESHANS FAMININ MAMMUR 10 PUSKESHANS FAMININ AMPER HUJU TAPAN 10 PUSKESHANS FAMININ FAMININ PUSKESHANS FAMININ PUSK			III.6
9 PUSESBANAS TANUNING MAMBUR III. III. 10 PUSESBANAS TANUNING MAMBUR III. III. 11 PUSESBANAS ARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 12 PUSESBANAS ARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 13 PUSESBANAS ARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 14 PUSESBANAS ARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 15 PUSESBANAS ARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 16 PUSESBANAS TARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 17 PUSESBANAS TARAWAI AMPREK HULU TAPAN III. III. 18 PUSESBANAS BARRA BURU III. III. III. 18 PUSESBANAS BARRA BURU III. III. III. 19 PUSESBANAS HURBAN SERASA III. III. 10 PUSESBANAS HURBAN SERASA III. 10 PUSESBANAS HURBAN SERASA III. III. 11 PUSESBANAS HURBAN SERASA HURBAN SERASA III. III. 12 PUSESBANAS KANTOR BERBANK III. III. III. 13 PUSESBANAS KANTOR BERBANK III. III. III. 14 PUSESBANAS KANTOR BERBANK III. III. III. III. 15 PUSESBANAS KANTOR BERBANKA III.			
10			
11 PUSKESMAS RANAH KURBANG			
12 PUSCESSAMS ASAM KUMBANG			
133 PUSESMAS TARUSAN	12		
15 PUSESMAS PASAR BABU		PUSKESMAS TARUSAN	
16		PUSKESMAS KOTO BARU	III.14
17			III.15
18			
19			
20			
11.21			
22			
23			
24			
25 RSUD DE, MUHAMMAD ZEIN PARINAN 26 PEKERJAN UMUM DAD PENTANAN RUANG 27 DINAS PERUMAN DAN PENTANAN RUANG 30 DINAS SERUMAHAN RARYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 31 RIZE 38 DINAS SERUMAHAN RARYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 39 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAREAH 30 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCANA DAREAH 31 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERCATATAN SIPIL 32 DINAS PERUMBUNGAN 33 DINAS PERUMBUNGAN 34 DINAS PERUMBUNGAN 35 DINAS PERUMBUNGAN 36 DINAS PERUMBUNGAN 37 DINAS PERUMBUNGAN 38 DINAS PERUMBUNGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN 30 DINAS PERUMBUNGAN 31 DINAS KOMBURKASI DAN INFORMATIKA 31 DINAS KOMBURKASI DAN INFORMATIKA 31 DINAS KOMBURKASI DAN INFORMATIKA 32 DINAS PERUMBUNGAN 33 DINAS PERUMBUNGAN 34 DINAS KOMBURKASI DAN INFORMATIKA 35 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENINGAH DAN TENAGA KERIL 36 DINAS PERUMBUNGAN 37 DINAS PERUMBUNGAN 38 DINAS PERUMBUNGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN 30 DINAS PERUMBUNGAN 30 DINAS PERUMBUNGAN 30 DINAS PERUMBUNGAN 31 BILAS TAN BERUMBUNGAN 32 BILAS TERMATIKASI DAN PERUMBUNGAN 33 BILAS TERMATIKASI DAN PERUMBUNGAN 34 BILAS TAN BERUMBUNGAN 35 BILAS TERMATIKASI DAN PENGEMBANGAN 36 BILAS TERMATIKASI TAN PENDEMBANGAN 37 DINAS PERUMBUNGAN 38 BILAS TERMATIKASI TAN PENDEMBANGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN DAN PENGEMBANGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN 30 BILAS TERMATIKASI TAN PENGEMBANGAN 30 BILAS TERMATIKASI TAN PENGEMBANGAN 31 BILAS TAN BERUMBUNGAN 31 BILAS TAN BERUMBUNGAN 31 BILAS TAN BERUMBUNGAN PENGEMBANGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN DAN PENGEMBANGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN DAN PENGEMBANGAN 39 DINAS PERUMBUNGAN BELANTAN BELANTA	24	PUSKESMAS KAYU GADANG	
27 DINAS FERUMAHAN RAYAT, KAWASAN PERMUKINAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 28 DINAS SATUAN POUSI PAMONG PRAJA DAN PERMADAN KEBAKARAN 30 DINAS KORDAN POUSI PAMONG PRAJA DAN PERMADAN KEBAKARAN 31 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 32 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 33 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 35 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERKATATAN SIPIL 37 DINAS PERMUBUNGAN 38 DINAS PERMUBUNGAN 39 DINAS KORDANAN MASATATAN PERMADAN PERMADAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39 DINAS KONDANAN MANDAL DAN PENADAN PENADAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30 DINAS KENDANANAN MODAL DAN PENADAN PENADA KERIL 30 DINAS KARDANAN MANDAL DAN PENADAN PENADA KERIL 31 DINAS KARDANAN MANDAL DAN PENADAN PENADA KERIL 32 DINAS PERMADAN MANDAL DAN PENADAN PENADA KERIL 33 DINAS PERMADAN MANDAL DAN PENADAN PENADA KERIL 34 DINAS KERBANAN DAN PENADAN PENADAN PENADA KERIL 35 DINAS KERBANAN DAN PENADAN PENADAN PENADA KERIL 36 DINAS PERMADAN MANDAL PENADAN PENADAN PENADA KERIL 37 DINAS PERMADAN DAN PENADAN PEN			
28 DINAS SATUAN POUSI PAMONG PRALA DAN PEMADAN KEBAKARAN III.29 29 BADAN PENANGGULANGAN BENANDA DAREAH III.29 30 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK III.30 31 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK III.30 31 DINAS SEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA III.31 32 DINAS SEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA III.32 33 DINAS SEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA III.33 34 DINAS SOMUNIKASI DAN INFORMATIKA III.33 35 DINAS SOMUNIKASI DAN INFORMATIKA III.34 35 DINAS SOMUNIKASI DAN INFORMATIKA III.34 36 DINAS SPANAMARA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU III.36 37 DINAS PENANAMARA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU III.36 38 DINAS SPENKANAN DAY PANGANA III.39 39 DINAS SPENKANAN DAY PANGANA III.39 39 DINAS PERKARANA DAY PANGAN III.39 40 DINAS PERKARANA DAY PANGAN III.39 41 DINAS PERKARANA DAY PANGAN III.30 41 DINAS PERKARANA DAY PANGAN III.30 42 SEKRETARIAT DARAH III.44 43 SEKRETARIAT DARAH III.44 44 DINAS PERDAGANANA DAN TRANSMIGRASI III.41 45 SEKRETARIAT DARAH III.44 46 SEKRETARIAT DARAH III.44 47 INSPEKTORAT DARAH III.44 48 BADAN PENERCANANA DARRAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.43 49 BADAN PENERCANANAN DARRAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.44 49 KECAMATAN SILAUT III.46 40 KECAMATAN SILAUT III.46 41 III.47 42 KECAMATAN SILAUT III.47 43 SEKRETARIAT DARAH III.47 44 BADAN PERESONNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.47 45 BADAN PENERCANANAN DARRAH, PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.47 46 KECAMATAN SILAUT III.48 47 INSPEKTORAT DARAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.48 49 KECAMATAN BANAH KEUANGAN, PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.51 51 KECAMATAN BANAH KEUANGAN PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.51 52 KECAMATAN BANAH KEUANGAN BANAH KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.51 53 KECAMATAN BANAH KEUANGAN BANAH KEUANGAN BERGANTI III.52 54 KECAMATAN BANAH KEUANGAN BANAH KE			III.26
29 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DABRAH 30 DINAS SORU, PEMBERDAYAN PERBUPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 31 DINAS SEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 32 DINAS PERBUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33 DINAS PERBUBUNGAN 33 DINAS PERHUBUNGAN 34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35 DINAS PERHUBUNGAN 36 DINAS PERHUBUNGAN 37 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 38 DINAS PERHUBUNGAN 39 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 39 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 39 DINAS PENANANAN MODAL DAN INFORMATIKA 39 DINAS PENANANAN MODAL DAN PERAVANAN TERPADU SATU PINTU 30 DINAS PENANANAN MODAL DAN PERAVANAN TERPADU SATU PINTU 31 BISTA PENANANAN MODAL DAN PERAVANAN TERPADU SATU PINTU 39 DINAS PERKANANAN PERPUSTAKAAN 39 DINAS PERKANANAN DAN PARAMAN 40 DINAS PERTANIAN 40 DINAS PERTANIAN 41 DINAS PERTANIAN 41 DINAS PERTANIAN 41 BISTA PERMADA DAN PERAVANAN PERPUSTAKAAN 42 SEKRETARIAT DAERAH 43 SEKRETARIAT DAERAH 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BISTA PENELURAN PENELURAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PERENCANANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 46 BADAN PERENCANANAN DAR PARAMAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 49 SEKRETARIAT DAERAH 49 KECAMATAN SILAUT 40 SISKABETARIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 41 BISTA MANUSIA 42 SEKRETARIAT DAERAH 43 SILAUT 44 SEKAMATAN SILAUT 44 SEKAMATAN SILAUT 45 BADAN PERENCANANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 46 BADAN PERENCANANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 49 SEKAMATAN BANAMG 50 SEKAMATAN BANAMG 51 SEKAMATAN BANAMG			
30 DINAS SCIAIL, PEMBERDAYAAN PEREMUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31 DINAS SEPREDUDUKAN DAN PERCATATAN SINJER 32 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 34 DINAS SEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 35 DINAS SEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 36 DINAS SEMBERDAYAAN KECIL DAN INFORMATIKA 37 DINAS SEMBERSA, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 38 DINAS PENANSARI, SEMBERSA, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 39 DINAS PENANSARI, DAN PENDUTSARAN 39 DINAS PERASARIANA DAN PENGENTAKANA 40 DINAS PERKARANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERCAGANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERCAGANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERCAGANAN DAN TRANSMIGRASI 42 SEKRETARIAT DERDI 43 SEKRETARIAT DERDI 44 BADAN PEREKACNANAN DAREAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAN PEREKACNANAN DAREAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PENGEKANAN AKEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN NEPERCANNAN DAREAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 47 INSPEKTIORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN SILAUT 40 SEKAMATAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 49 KECAMATAN SILAUT 40 SEKAMATAN BANAHA MENENGAN SUMBER DAYA MANUSIA 40 INSPEKTIORAT DAERAH 41 INSPEKTIORAT DAERAH 42 SEKAMATAN BANAHA MENGENGAN SUMBER DAYA MANUSIA 44 BINAS KECAMATAN BANAHA MENENGAN SUMBER DAYA MANUSIA 45 SEKAMATAN BANAHA MENENGAN SUMBER DAYA MANUSIA 46 SEKAMATAN BANAHA MENGENGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTIORAT DAERAH 48 KECAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 49 KECAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 49 KECAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 40 SEKAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 40 SEKAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 41 INSPEKTIORAT DAERAH 42 SEKAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 44 SEKAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 45 KECAMATAN BANAHA MENANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 46 SEKAMATAN BANAHA ME			
31. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 32. DINAS PENBERDAYAAN MASYARAKT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33. DINAS PERHUBUNGAN 34. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35. DINAS PERHUBUNGAN 36. DINAS PENBERSA, USAMA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 37. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 38. DINAS PENANANARI MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATU PINTU 38. DINAS PENANANARI MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATU PINTU 38. DINAS PENANANARI MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATU PINTU 38. DINAS PERKINSATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 39. DINAS PERKINSATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 40. DINAS PERKINSATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 41. DINAS PERKINSATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 42. SEKRETARIAT DAERAH 43. SEKRETARIAT DARRAH 44. BADAN PERRUSANANA DAN PARAGAN 44. BADAN PERRUSANANA DAN PENBEMBANGAN 45. BADAN PERRUSANANA DARERH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 46. BADAN PERRUSANANA DARERH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 47. HINSPEKTORAT DAERAH 48. KECAMATAN SILAUT 49. KECAMATAN SILAUT 40. HINSPEKTORAT DAERAH 49. KECAMATAN SILAUT 49. SEKAMATAN BANANG 50. KECAMATAN SILAUT 50. KECAMATAN SILAUT 50. KECAMATAN SILAUT 50. KECAMATAN KICTO XI TRAUSAN 50. SECAMATAN KICTO XI TRAUSAN 50. SECAMATAN BANANG 50. KECAMATAN SILAUT 51. KECAMATAN SILAUT 52. KECAMATAN SILAUT 53. KECAMATAN SILAUT 54. KECAMATAN SILAUT 55. KECAMATAN SILAUT 56. SECAMATAN SILAUT 57. KECAMATAN SILAUT 58. SECAMATAN BANANG 59. KECAMATAN SILAUT 59. KECAMATAN SILAUSAN 59. KECAMATAN SILAUT 59. KECAMATAN SILAUT 59. KECAMATAN SILAUSAN 59. KECAMATAN SIL			
32 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33 DINAS PEMBURUNGAN 34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 37 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 38 DINAS KOMUNIKASI DAN HERABAGAH DAN TENAGA KERJA 39 DINAS KARANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 31 II.35 38 DINAS KARANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 40 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 III.39 40 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 III.39 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 III.34 42 ESERETARIAN DERPAH 43 SEKETANIAN PANGAN 44 BADAH PERERCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAH PERERCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAH PERERCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN BALAUT 49 KECAMATAN BALAUT 40 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 40 KECAMATAN BALAUT 41 KECAMATAN BALAUT 41 KECAMATAN BALAUT 41 KECAMATAN BALAUT 42 KECAMATAN BALAUT 43 KECAMATAN BALAUT 44 BERKAMATAN BAYANG 45 BADAH KERBERAWANAN DAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 49 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 40 KECAMATAN BALAUT 41 KECAMATAN BAYANG 4			
33 OINAS PERTUBUNGAN 34 OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35 OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 36 OINAS KOMERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 37 OINAS PENARAMAN MODAL DAN PERADAN TERPADU SATU PINTU 38 DINAS PERANAMAN MODAL DAN PERADAN TERPADU SATU PINTU 39 OINAS PERANAMAN MODAL DAN PERADAN TERPADU SATU PINTU 30 DINAS PERANAMAN MODAL DAN PERADAN TERPADU SATU PINTU 31 III.38 39 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 30 DINAS PERTANIAN 31 III.39 40 DINAS PERTANIAN 31 III.39 40 DINAS PERTANIAN 31 III.30 41 DINAS PERTANIAN 41 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI 41 DINAS PERTANIAN 42 SEKETANIAT DAERAH 44 BADAN PERRENCANAMAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PERGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 45 BADAN PERGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPECTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILUT 48 KECAMATAN SILUT 49 KECAMATAN KUNANG 50 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 III.50 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 III.51 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 III.52 53 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 54 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 55 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 56 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 57 KECAMATAN BAYANG 58 KECAMATAN RANAH SARABAN 59 KECAMATAN RANAH SARABAN 50 KECAMATAN RANAH SARABAN 51 III.55 56 KECAMATAN BAYANG WARABAN 57 KECAMATAN BAYANG WARABAN 58 KECAMATAN BAYANG WARABAN 59 KECAMATAN BAYANG WARABAN 50 KECAMATAN BAYANG WARABAN 51 III.55 56 KECAMATAN BAYANG WARABANAN 57 KECAMATAN BAYANG WARABANAN 59 KECAMATAN BAYANG WARABANANANAN WARABANANANANANANANANANANANANANANANANANAN			
34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35 DINAS KOMERASI, USAHA KEGLI DAN MENENGAH DAN TENAGA KERIA 36 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 37 DINAS PERNAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 38 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 39 DINAS PERNAMANAN DAN PERPUSTAKAAN 39 DINAS PERKRANAH DAN PANGAN 40 DINAS PERTANIAN 41 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI 42 SEKRETANIAT DERGH 43 SEKRETANIAT DERGH 44 BADAN PERRENANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAN PENGELOLAAN NEJANGAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PENGELOLAAN KEJANGAN, PENDEAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN KEPEGAWANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN SILAUT 50 SECAMATAN BANAN SILAUT 51 RECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 RECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 52 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 53 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 54 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 55 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 56 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 57 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 58 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 59 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 59 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 59 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 50 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 59 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 52 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 53 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 54 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 55 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 56 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 57 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 58 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 59 KECAMATAN KOTO KI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO			
SS DINAS FORPRASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 36 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN DELAYANAN TERPADU SATU PINTU 37 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN DELAYANAN TERPADU SATU PINTU 38 DINAS KARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 39 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 40 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERDAGARNAN DAN TRANSMIGRASI 41 DINAS PERDAGARNAN DAN TRANSMIGRASI 42 SEKRETARIAT DAREN 43 SEKRETARIAT DAREN 44 BADAN PERENCANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAN PERENCANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PERENCANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 46 BADAN KEPEGAWAJAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN SILAUT 40 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 50 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 51 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 52 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 53 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 54 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 55 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 56 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 III.55 52 KECAMATAN RAIRAH AMPEK HULU TAPAN 53 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 54 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 55 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 56 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 60 KECAMATAN SILAUT 61 III.55 60 KECAMATAN SILAUT 61 III.55 61 KECAMATAN BAYANG 61 III.55 62 KECAMATAN SILAUT 63 BADAN KESEATUN BANGASA DAN POLITIK 64 KECAMATAN BAYANG 65 BADAN KESEATUN BANGASA DAN POLITIK 66 KECAMATAN BAYANG 67 KECAMATAN BAYANG 68 KECAMATAN BAYANG 69 KECAMATAN BAYANG 70 KECAMATAN BAYANG 71 KECAMATAN BAYANG 72 KECAMATAN BAYANG 73 KECAMATAN BAYANG 74 KECAMATAN BAYANG 75 KECAMATAN BAYANG 76 KECAMATAN BAYANG 77 KECAMATAN BAYANG 78 KECAMATAN BAYANG			
36 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 37 DINAS PERIKINISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 38 DINAS PERIKINISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 39 DINAS PERIKINAN DAN PERPUSTAKAAN 39 DINAS PERIKANAN DAN PERPUSTAKAAN 40 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN 41 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI 42 SEKRETARIAT DAERAH 43 SEKRETARIAT DAERAH 44 BADAN PERBENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAN PENERCANANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PENGELOLAHA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN PENGELOLAHA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN RANHAH MPEK HULU TAPAN 50 KECAMATAN RANHAH MPEK HULU TAPAN 51 KECAMATAN NOTO XI TARUSAN 51 KECAMATAN LUNANG 51 KECAMATAN LUNANG 51 KECAMATAN IN NAGARI BAYANG UTARA 52 KECAMATAN IN NAGARI BAYANG UTARA 53 KECAMATAN IN YAGARI BAYANG UTARA 54 KECAMATAN IN YAGARI BAYANG UTARA 55 KECAMATAN IN YAGARI BAYANG UTARA 56 KECAMATAN IN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN IN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN SILAUT 5	35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
38 DINAS YEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN III.38 39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.39 40 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.39 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.39 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.30 41 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.30 42 SERRETARIAT DAERAH III.42 43 SEKRETARIAT DAERAH III.43 44 BERDAN PERRICANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.44 45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.45 46 BADAN KEPGAWAIAN DAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 INSPEKTORAT DAERAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN SILAUT III.49 51 KECAMATAN KORO XI TARUSAN III.59 51 KECAMATAN KORO XI TARUSAN III.59 52 KECAMATAN LUNANAG III.59 53 KECAMATAN WA KORO XI TARUSAN III.59 54 KECAMATAN IV NAGABI BAYANG UTARA 55 KECAMATAN IV NAGABI BAYANG UTARA 56 KECAMATAN IV ANGABI BAYANG UTARA 57 KECAMATAN NA KORO XI TARUSAN III.59 58 KECAMATAN NA KECAMATAN KAPAS III.59 59 KECAMATAN SUTARA SILAUT III.59 60 KECAMATAN SUTARA SILAUT III.59 61 KECAMATAN SUTARA III.59 62 KECAMATAN SUTARA III.59 63 KECAMATAN SUTARA III.59 64 KECAMATAN SUTARA III.59 65 KECAMATAN SUTARA III.59 66 KECAMATAN SUTARA III.59 67 KECAMATAN SUTARA III.59 68 KECAMATAN SUTARA III.59 69 KECAMATAN SUTARA III.59 60 KECAMATAN SUTARA III.59 61 KECAMATAN SUTARA III.59 61 KECAMATAN SUTARA III.59 62 KECAMATAN SUTARA III.59 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.59 64 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 65 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 66 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 67 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 68 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 69 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 61 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN 61 III.59 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.59 62 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 64 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN 65 BADAN KESATUAN BASA AMPER BALAI TAPAN 66 BADAN KESATUAN BASA AMPER BALAI TAPAN 67 JURISAN BABABAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KET		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
39 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN III.39 40 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN III.39 41 DINAS PERTANIAN III.39 42 SEKRETARIAT DAERAH III.42 43 SEKRETARIAT DAERAH III.42 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.43 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.44 45 BADAN PENGEGULAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.45 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 III.59EKTORAT DAERAH III.45 48 KECAMATAN SILAUT III.48 49 KECAMATAN SILAUT III.48 49 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN UNANG III.59 51 KECAMATAN UNANG III.59 52 KECAMATAN KOTO XI TABUSAN III.51 52 KECAMATAN KOTO XI TABUSAN III.52 53 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 54 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 55 KECAMATAN BATANG KAPAS 55 KECAMATAN BATANG KAPAS 56 KECAMATAN BATANG KAPAS 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.59 51 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.59 52 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 53 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 54 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 55 KECAMATAN BATANG KAPAS 56 KECAMATAN BATANG KAPAS 57 KECAMATAN BATANG KAPAS 58 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG III.55 59 KECAMATAN BATANG KAPAS 51 III.59 50 KECAMATAN BATANG KAPAS 51 III.59 51 KECAMATAN BATANG KAPAS 51 III.59 52 KECAMATAN BATANG KAPAS 53 III.55 54 KECAMATAN BATANG KAPAS 55 KECAMATAN BATANG KAPAS 56 KECAMATAN BATANG KAPAS 57 KECAMATAN BATANG KAPAS 58 III.59 59 KECAMATAN BATANG KAPAS 59 KECAMATAN BATANG K		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	III.37
40 DINAS PERTANIAN III.30 41 DINAS PERDAGANAGAN DAN TRANSMIGRASI III.30 41 DINAS PERDAGANAGAN DAN TRANSMIGRASI III.31 42 SERRETARIAT DAERAH III.32 43 SEKRETARIAT DAERAH III.32 44 BADAN PERGENCAMANAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.34 45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.45 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 III.52 48 KECAMATAN SILAUT III.32 49 KECAMATAN SILAUT III.33 50 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN III.39 50 KECAMATAN SILAUT III.39 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.55 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.55 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.55 53 KECAMATAN IV JURAJ III.52 53 KECAMATAN IV JURAJ III.53 54 KECAMATAN IV JURAJ III.55 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BAYANG III.55 50 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 52 KECAMATAN BAYANG III.55 53 KECAMATAN BAYANG III.55 54 KECAMATAN BAYANG III.55 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BAYANG III.55 50 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 52 KECAMATAN BAYANG III.55 53 KECAMATAN BAYANG III.55 54 KECAMATAN BAYANG III.55 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BAYANG III.55 50 KECAMATAN BAYANG III.57 50 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 52 KECAMATAN BAYANG III.55 53 KECAMATAN BAYANG III.55 54 KECAMATAN BAYANG III.55 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BAYANG III.55 50 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 51 KECAMATAN BAYANG III.55 52 KECAMATAN BAYANG III.55 53 KECAMATAN BAYANG III.55 54 KECAMATAN BAYANG III.55 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BA			III.38
41 DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI III.43 42 SEKRETARIAT DAERAH III.42 43 SEKRETARIAT DAERAH III.43 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.43 44 BADAN PERENCANAAN DEARAH, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.43 45 BADAN PERBENCANAAN RULANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.43 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.44 47 INSPEKTORAT DAERAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.49 49 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN LINANG III.49 51 KECAMATAN LINANG III.51 52 KECAMATAN LINANG III.52 53 KECAMATAN SILAUT III.51 54 KECAMATAN SILAUT III.51 55 KECAMATAN SILAUT III.51 56 KECAMATAN SILAUT III.51 57 KECAMATAN SILAUT III.51 58 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 50 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMATAN SILAUT III.52 53 KECAMATAN SILAUT III.51 54 KECAMATAN SILAUT III.51 55 KECAMATAN SILAUT III.51 56 KECAMATAN SILAUT III.51 57 KECAMATAN SILAUT III.51 58 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 50 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMATAN SILAUT III.51 52 KECAMATAN SILAUT III.51 53 KECAMATAN SILAUT III.51 54 KECAMATAN SILAUT III.51 55 KECAMATAN SILAUT III.51 56 KECAMATAN SILAUT III.51 57 KECAMATAN SILAUT III.51 58 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 50 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMATAN SILAUT III.51 52 KECAMATAN SILAUT III.51 53 KECAMATAN SILAUT III.51 54 KECAMATAN SILAUT III.51 55 KECAMATAN SILAUT III.51 56 KECAMATAN SILAUT III.51 57 KECAMATAN SILAUT III.51 58 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 59 KECAMATAN SILAUT III.51 50 KECAMATAN SILAUT III.51 51 KECAMA			
42 SEKRETARIAT DAERAH 43 SEKRETARIAT DAERAH 44 SEKRETARIAT DAERAH 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44 BADAN PERGENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN REPGAWAINAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 48 KECAMATAN SILAUT 49 SECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 50 KECAMATAN LUNANG 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 III.50 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 KECAMATAN SILAUT 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 KECAMATAN SILAUT 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 III.50 52 KECAMATAN SILAUT 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 III.50 52 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 53 KECAMATAN SILAUT 54 KECAMATAN SILAUT 55 KECAMATAN SILAUT 56 KECAMATAN SILAUT 57 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 58 KECAMATAN SILAUT 59 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 KECAMATAN SILAUT 51 III.50 51 III.50 5			
43 SERRETARIAT DPRD III.43 44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.43 45 BADAN PEROSECLANA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.44 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 III.59 KEYORAT DAERAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.49 49 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN LUNANG III.50 51 KECAMATAN LUNANG III.50 51 KECAMATAN LUNANG III.50 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.51 52 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.53 53 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.53 54 KECAMATAN IV JURAI III.55 55 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.55 57 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 58 KECAMATAN SUTERA III.55 59 KECAMATAN LUNGAYNG III.50 60 KECAMATAN IROGO SARI BAGANTI III.57 58 KECAMATAN III.60 61 KECAMATAN HENGAYANG III.59 60 KECAMATAN HENGAYANG III.59 60 KECAMATAN HENGAYANG III.59 61 KECAMATAN HENGAYANG III.59 62 KECAMATAN HENGAYANG III.59 63 BADAN KESATUNA BAJAGANTI III.60 63 BADAN KESATUNA BAJAGANTA DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN III.61 64 KECAMATAN BARANGSA DAN POLITIK III.62 65 BADAN KESATUNA BAJAGA MERE BALAI TAPAN III.62 66 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.62 67 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.62 68 BADAN KESATUNA BAJAGSA DAN POLITIK III.62 69 BADAN KESATUNA BAJAGSA DAN POLITIK III.62 60 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.63 60 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.65 61 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.65 62 KECAMATAN BASA AMPER BALAI TAPAN III.65 63 BADAN KESATUNA BAJAGSA DAN POLITIK III.62 64 BASA BASA AMPER BALAI TAPAN III.65 65 BADAN KESATUNA BAJASA AMPER BALAINA DAS BUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN 1V 66 BASA BADAN KESATUNA BAJASA AMPER BALANIA DAS BUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN REPD DAN PAS DENGAN PERATURAN VIII 66 BARAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN REPD DAN PAS DENGAN PERATURAN VIII 67 BARAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN REPD DAN PAS DENGAN PERATURAN VIII 68 BAMPIRAN VIII SIKKRONISASI PROGRAM PADA PENUBAHAN APBD VIII 68 BATAR TENTANG PERUBAHAN APBD VIII 68 BATAR TENTANG PERUBAHAN APBD VI			
44 BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN III.44 45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH III.45 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 INSPEKTORAT DAERAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN III.49 50 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN III.50 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.50 51 KECAMATAN LONANG III.55 52 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN BAYANG III.55 53 KECAMATAN BAYANG III.55 54 KECAMATAN IY JURAI III.51 55 KECAMATAN BAYANG III.55 56 KECAMATAN BAYANG III.55 57 KECAMATAN BAYANG III.55 58 KECAMATAN BAYANG III.55 59 KECAMATAN BAYANG III.55 60 KECAMATAN BAYANG III.55 61 KECAMATAN BAYANG III.55 61 KECAMATAN BAYANG III.55 62 KECAMATAN BAYANG III.55 63 KECAMATAN BAYANG III.55 64 KECAMATAN BAYANG III.55 65 KECAMATAN BAYANG III.55 66 KECAMATAN BAYANG III.55 67 KECAMATAN BAYANG III.55 68 KECAMATAN BAYANG BAYANG III.55 69 KECAMATAN RANAH PESISIR III.55 60 KECAMATAN RANAH PESISIR III.55 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 62 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.61 62 KECAMATAN BAYANG BAYANG 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 62 KECAMATAN BAYANG BAYANG 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 64 KECAMATAN BAYANG BAYANG III.65 65 KECAMATAN BAYANG BAYANG 66 KECAMATAN BAYANG BAYANG 67 KECAMATAN BAYANG BAYANG 68 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 69 KECAMATAN BAYANG BAYANG 60 KECAMATAN BAYANG BAYANG 60 KECAMATAN BAYANG BAYANG 61 KECAMATAN BAYANG BAYANG 61 KECAMATAN BAYANG BAYANG 62 KECAMATAN BAYANG BAYANG 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 60 KECAMATAN BAYANG BAYANG 61 KECAMATAN BAYANG BAYANG 61 KECAMATAN BAYANG BAYANG 62 KECAMATAN BAYANG	The second secon		
45 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 47 INSPEKTORAT DAERAH 48 KECAMATAN SILAUT 48 KECAMATAN SILAUT 50 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 51 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 51 KECAMATAN SUNAH KUTOR XI TARUSAN 51 KECAMATAN BATANGAN SUNAH SU			
46 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA III.46 47 INSPEKTORAT DAERAH III.47 48 KECAMATAN SILAUT III.49 49 KECAMATAN SILAUT III.49 50 KECAMATAN SILAUT III.49 51 KECAMATAN LINANG III.50 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.50 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.51 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.52 53 KECAMATAN IV AGARI BAYANG III.53 54 KECAMATAN IV AGARI BAYANG III.53 55 KECAMATAN IV JURAI III.55 55 KECAMATAN SILAUT III.55 56 KECAMATAN SILAUT III.55 57 KECAMATAN SILAUT III.56 57 KECAMATAN SILAUT III.56 58 KECAMATAN SILAUT III.56 59 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 52 KECAMATAN SILAUT III.56 53 KECAMATAN SILAUT III.56 54 KECAMATAN SILAUT III.56 55 KECAMATAN SILAUT III.56 56 KECAMATAN SILAUT III.56 57 KECAMATAN SILAUT III.56 58 KECAMATAN SILAUT III.56 59 KECAMATAN SILAUT III.56 50 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 52 KECAMATAN SILAUT III.56 53 KECAMATAN SILAUT III.56 54 KECAMATAN SILAUT III.56 55 KECAMATAN SILAUT III.56 56 KECAMATAN SILAUT III.56 57 KECAMATAN SILAUT III.56 58 KECAMATAN SILAUT III.56 59 KECAMATAN SILAUT III.56 59 KECAMATAN SILAUT III.56 50 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 51 KECAMATAN SILAUT III.56 52 KECAMATAN SILAUT III.56 53 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 54 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 55 KECAMATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN III.63 56 KECAMATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN III.63 56 KEKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BASA SAMPEK BALAITAN BASERTA KELUARAN III.63 56 KEKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BASA SAMPEK BALAITAN BASERTA KELUARAN III.63 57 KEKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TURUSAN PEMERINTAHAN PADA PERUBAHAN REPODAN PERUBAHAN APBD III.57 58 KEKAPITULASI PERUBAHAN BELA			
47 INSPEKTORAT DERAH 48 KECAMATAN SILAUT 48 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN SILAUT 49 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 49 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 49 KECAMATAN RUNANG 50 KECAMATAN LUNANG 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 51 KECAMATAN BYANG 52 KECAMATAN BYANG 53 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 54 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 55 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 55 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA 56 KECAMATAN SUTERA 57 KECAMATAN SUTERA 58 KECAMATAN SUTERA 59 KECAMATAN RUNEGA BAGANTI 59 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI 59 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI 59 KECAMATAN PANCUNG SOAL 50 KECAMATAN PANCUNG SOAL 51 KECAMATAN PANCUNG SOAL 51 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 51 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 59 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 50 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 51 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 50 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 51 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 51 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 51 KECAMATAN BESETTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN 50 KECAMATAN BESETTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN 51 KERAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 KERAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 CREAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 CREAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 CREAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN 51 UNTUR BERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK BERUBAHAN BERUBA			
49 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN III.49 50 KECAMATAN LUNANG III.50 51 KECAMATAN LUNANG III.50 52 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.53 54 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.53 55 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.54 55 KECAMATAN LUNAN III.55 56 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.55 57 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 58 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 59 KECAMATAN LUNGG SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN LUNGG SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN LUNGG SARI BAGANTI III.59 61 KECAMATAN AIRPURA IIII.62 62 KECAMATAN AIRPURA IIII.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV AMPIRAN VERKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV AMPIRAN VERKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIRAN VERKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIRAN VERKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMO DENGAN PERUBAHAN APBD VII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMO DENGAN PERUBAHAN APBD VII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMO DENGAN PERUBAHAN APBD VII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA PADA PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RKYPO DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA PADA PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RKYPO DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA PERUBAHAN PADA PERUBAHAN PINGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM P	47	INSPEKTORAT DAERAH	_
50 KECAMATAN LUNANG III.50 51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.51 52 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.51 52 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN IV MAGARI BAYANG UTARA III.53 54 KECAMATAN IV JURAI III.54 55 KECAMATAN IV JURAI III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.55 57 KECAMATAN SUTERA III.55 58 KECAMATAN SUTERA III.57 58 KECAMATAN ENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LENGAYANG III.59 61 KECAMATAN HENGAYANG III.59 62 KECAMATAN HENGAYANG III.59 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.61 64 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.61 65 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 III.69 AMPIIRAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV AMPIIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIIRAN V SIKKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VI AMPIIRAN VI SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VI AMPIIRAN VI SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIIRAN V SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIIRAN V SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIIRAN V SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH VI AMPIIRAN V DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN		KECAMATAN SILAUT	III.48
51 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN III.51 52 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN IY JURAI III.53 54 KECAMATAN IY JURAI III.53 55 KECAMATAN IY JURAI III.54 55 KECAMATAN IY JURAI III.55 56 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 57 KECAMATAN SUTERA III.55 58 KECAMATAN SUTERA III.55 59 KECAMATAN RANAH PESISIR III.55 50 KECAMATAN LENGAYANG III.59 59 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN AIRPURA III.61 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.61 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 64 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 65 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 66 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 67 BEKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV 68 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 69 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 60 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 61 BEKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV 69 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 60 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 61 BEKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN IV 60 BEKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN IV 61 BEKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM 61 VI 62 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PENJADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENGAN PERATURAN IV 63 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN APBD 64 VI 65 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENGAN PERATURAN IV 70 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENGAN PERATURAN IVIII 65 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENGAN PERATURAN IVIII 66 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENGAN PERATURAN IVIII 67 BADAN KESATUAN BANGSA PROGRAM PADA PERUBAHAN REPOD DAN PAS DENG			III.49
S2 KECAMATAN BAYANG III.52 53 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.53 54 KECAMATAN IV JURAI III.54 55 KECAMATAN IV JURAI III.55 56 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.56 57 KECAMATAN SUTERA III.57 58 KECAMATAN SUTERA III.59 59 KECAMATAN RANAH PESISIR III.59 60 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 62 KECAMATAN AND SOAL III.61 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.61 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V AMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH I TENTANG PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM			
S3 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA III.55			
S4 KECAMATAN IV JURAI III.54 55 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.55 57 KECAMATAN SUTERA III.55 58 KECAMATAN RANAH PESISIR III.57 58 KECAMATAN LENGAYANG III.59 59 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN AIRPURA III.61 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV ampiran V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA VI ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN VI ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN VI ampiran VI SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VI ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX Ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
S5 KECAMATAN BATANG KAPAS III.55 56 KECAMATAN SUTERA III.56 57 KECAMATAN SUTERA III.56 57 KECAMATAN RANAH PESISIR III.56 58 KECAMATAN LENGAYANG III.59 58 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANIA UNTUK PEMENUHAN SPM VI ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMO DENGAN PERUBAHAN APBD VIII AMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
SECAMATAN SUTERA			
57 KECAMATAN RANAH PESISIR III.57 58 KECAMATAN LENGAYANG III.58 59 KECAMATAN LENGAYANG III.59 60 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.61 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VII SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VII SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII AMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
S8 KECAMATAN LENGAYANG III.58 59 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI III.59 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL IIII.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL IIII.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL IIII.60 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN IIII.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V Ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM JINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
59 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI 60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VII SIKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
60 KECAMATAN PANCUNG SOAL III.60 61 KECAMATAN AIRPURA IIII.61 62 KECAMATAN AIRPURA IIII.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMD DENGAN PERUBAHAN APBD VIII sinkronisasi PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME
62 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN III.62 63 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK III.63 ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN VIII ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			III.60
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Lampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI Lampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD LAMPIRAN VIII SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH LAMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
Ampiran IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V Ampiran VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI Ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD AMPIRAN VIII SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX AMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA URAMPIRAN VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH SIKRONISASI PROGRAM PERGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X	63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III.63
Ampiran V DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA V DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM VI SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD VIII SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH X X			IV
Ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII Ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD VIII Ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX Ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			v
Ampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD VII Ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD VIII Ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX Ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X	ampiran VI	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	VI
Ampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD VIII Ampiran IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH IX Ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X			
ampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN X	ampiran viii i		
			IX
			Х
ampiran XI DAFTAR PIUTANG DAERAH (BRUTO) XI		DAFTAR PIUTANG DAERAH (BRUTO)	XI
ampiran XII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH XII		DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	XII
Ampiran XIII DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP XIII			XIII
Ampiran XIV DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI XIV DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	ampiran Arv	DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	
Ampiran XV DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH XV Ampiran XVI DAFTAR PINJAMAN DAERAH XVI			XV